



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governancedan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Paradigma baru di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan oleh otonomi daerah menggeser peran pemerintah dari *power* kepada *empowerment*. Paradigma ini mengarahkan peran aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional.

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pewujudan good government adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah dalam konteks (1) kinerja sesuai dengan Tupoksi, dan (2) keuangan sesuai dengan dokumen anggaran yang telah disusun diawal tahun. Akuntabilitas pemerintahan yang dipercaya oleh publik dan stakeholder akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi.



Pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sukasari selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Sukasari sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban



yang tepat. jelas. terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna. berhasil guna. bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi. kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. kolusi dan nepotisme. maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum. azas tertib penyelenggaraan negara. azas kepentingan umum. azas keterbukaan. azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sukasari Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja. realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Sukasari

Kecamatan Sukasari merupakan salah satu dari 30 Kecamatan yang ada di wilayah Administrasi Pemerintah Kota Bandung, memiliki luas wilayah kurang lebih 627,518 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong Kab. Bandung Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
- Sebelah Barat : Kecamatan Parongpong Kab. Bandung Barat
- Sebelah Timur : Kecamatan Cidadap Kota Bandung

Letak Wilayahnya berada pada permukaan geografis yang berbukit berada pada ketinggian 500 m dpl suhu maksimum dan minimum rata-rata 22 derajat celcius dengan curah hujan kurang lebih 1.807 mm/th Kecamatan Sukasari membawahi 4 Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Isola
2. Kelurahan Geger Kalong
3. Kelurahan Sarijadi
4. Kelurahan Sukarasa

Kecamatan Sukasari terdiri dari 32 Rukun Warga (RW), 220 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah kepala keluarga di Kecamatan Sukasari sebanyak 20.298 KK (data sampai dengan November 2019). Berikut ini adalah kondisi penduduk Kecamatan Sukasari dengan berbagai kriteria

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Sukasari

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk (jiwa)	80.138	80.971	81.128	81.018	81.039
Rata - Rata Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	127,70	129,03	129,28	128,43	126,59
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,008	1,010	1,001	1,006	1,020

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Laki - Laki	41.447	41.894	41.988	42.037	41.988
Perempuan	38.691	39.077	39.140	38.981	39.051
Jumlah	80.138	80.971	81.128	81.018	81.039

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Tidak Mempunyai Ijazah	29.310	28.850	28.877	27.289	31.037
SD/ MI/ Sederajat	15.562	16.119	16.116	15.578	13.661
SMP/MTs/Sederajat (%)	12.194	12.200	12.203	12.181	12.175
SLTA/Sederajat (%)	15.595	15.813	15.825	15.279	15.171
Perguruan Tinggi (%)	7.653	8.133	8.288	7.428	7.395
Jumlah	80.138	80.971	81.128	81.018	81.039

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

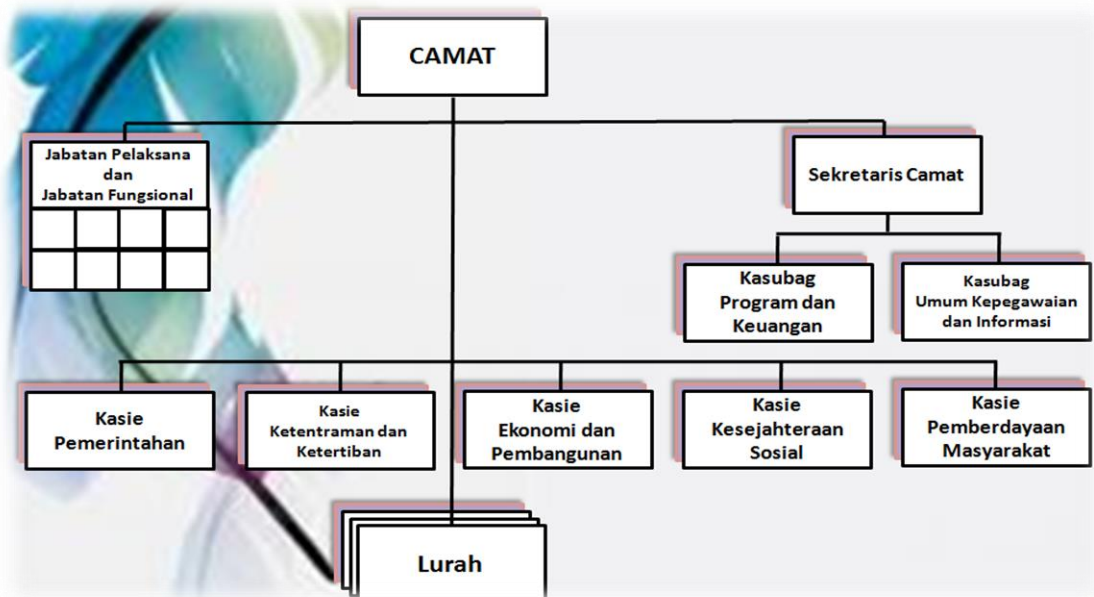
UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota / Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut. Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

Kecamatan Sukasari Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD). Kecamatan Sukasari mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Sukasari mempunyai fungsi :

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Sukasari dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh aparatur dibawahnya sesuai struktur organisasinya :

**STRUKTUR KECAMATAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2019**



1.4. Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Sukasari Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan



baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sukasari Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen;
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan



program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukasari Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis.

Tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sukasari dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukasari, sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi Kelurahan sebesar 80 %;
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70 %;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD;
5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
8. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;



Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Sukasari, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.

1.5. Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Sukasari Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara REVISI Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.



1.6. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2017 adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi RPJMD 2018-2023 yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. dalam hal ini Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Sukasari Kota Bandung Nomor 050/56-Kec.Pnyileukan kTahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Kota



Bandung dibuat pada masa jabatannya. dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Sukasari Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sukasari Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Forum SKPD. sehingga Renstra Kecamatan Sukasari Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sukasari Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya. Renstra Kecamatan Sukasari Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sukasari Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis sesuai *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017* pada lampiran halaman 397 sehingga tujuan disesuaikan dengan tugas dan fungsi dibentuknya SKPD tersebut dalam



mendukung ketercapaian visi dan misi RPJMD 2018-2023. Dimana Visi dan misi RPJMD 2018-2023 sebagai berikut :

Visi :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL. NYAMAN. DAN SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Misi :

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih;
3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan;
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaborasi dan terintegrasi.

2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan terhadap Perencanaan Strategis. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukasari selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukasari 2019.



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

Tabel 2.1

Tujuan. Sasaran. Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2019

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	SETELAH REVISI						
				INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sukasari	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sukasari	Rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	80	80	80,20	80,40	80,50
				Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	25	25	50	75	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	80	80	80	81	81



2.1.2.Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukasari ditetapkan melalui Keputusan Camat Sukasari Nomor : 050/Kep.008.2-Kec.Sksr/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

Bersamaan dengan revisi rencana strategis Kecamatan juga dilakukan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Hanya ada dua indikator kinerja yang dimasukkan ke Indikator Kinerja Utama antara lain : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tingkat Pemberdayaan Lembaga karena merupakan tugas pokok dan fungsi SKPD di Kecamatan.



INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sukasari	Rata rata hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Uraian Indikator Kinerja Utama Kecamatan beserta penjelasannya dapat dilihat pada tabel 2. 2.



Tabel 2.1.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA BERSERTA FORMULASI PENGUKURAN
KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG
TAHUN 2018 – 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sukasari	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	Merupakan IKU/ PK dan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survei kepuasan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persepsi Kelurahan Unggul					<p>Tindaklanjut Temuan Inspektorat / BPK</p> <p>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/ melaksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) <ul style="list-style-type: none"> - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan





L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat <p>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Kepengurusan - Gardu Sosial - Lumbung sosial - Peta Rawan Bencana - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							<p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku \geq 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> - petunjuk arah ke masjid - ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alrm waktu sholat



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							5. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku \geq 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung 6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah <ul style="list-style-type: none"> - petunjuk arah ke masjid - ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alrm waktu sholat 7. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							<p>8. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung <p>9. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> - petunjuk arah ke masjid - ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alm waktu sholat



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							10. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 11. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilih - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT)



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							<p>12. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak <p>13. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							<p>14. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>15. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi ≥ 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>16. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) Kriteria :</p>



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							<p>a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan</p> <p>b. Jalan terpelihara /tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan</p> <p>c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan</p> <p>d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambblas</p> <p>e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</p>



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA	SUMBER DATA	
							f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau 17. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART
3	Meningkatnya Pembedayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembangan Kemasyarakatan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskam ling Aktif	Kelurahan	% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 16 Kriteria RW Unggul) meliputi : Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							<p>2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah</p> <p>3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R</p> <p>4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester</p> <p>5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS</p> <p>Kriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakn / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini :</p> <p>1. Satu Kampung Satu Taman Bermain;</p>



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							2. Satu Kampung Satu Taman Bermain; 3. Balai RW/Markas Karang Taruna; 4. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll) 5. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang; 6. Gapura Kujang; 7. Satu Kampung Satu Produk; 8. Kampung Berkebun; 9. Kampung Caang Baranang; 10. MCK komunal; 11. Pavingisasi 12. Gerakan satu rumah satu tanaman; 13. Movie on the move (Layar tancep)/ Nonton Bareng



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							14. Media Kampanye Kampung Unggul 15. Satu Rumah satu jumentik 16. Laporan RW tepat waktu minimal form A : a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5) b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C) c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni 17. Media Kampanye Kampung Unggul 18. Satu Rumah satu jumentik



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							<p>19. Laporan RW tepat waktu minimal form A :</p> <p>d. Laporan Kependudukan (Format A1 -A5)</p> <p>e. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)</p> <p>f. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni</p> <p>20. RW berdaya</p> <p>a. Ada kepengurusan</p> <p>b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)</p> <p>c. Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)</p>



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							<p>% LKK Unggul Kriteria LKK Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan mempunyai rencana / agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/ Kelurahan) Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							<p>3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan</p> <p>4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun</p>
							<p>% Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA	SUMBER DATA	
							5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)



2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Kecamatan Sukasari Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja
Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Sukasari	Rata rata hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	80
		Prosentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, masyarakat dan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	25
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	80



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan Sukasari Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara REVISI atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019 - 2023 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Bandung.



Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara REVISI atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100%	Melebihi/ Melampaui Target
2.	= 100%	Sesuai Target
3.	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini Kecamatan Sukasari Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018 - 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan



pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program. sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi RPJMD Pemerintah Kota Bandung. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Sukasari Nomor : 050/Kep.008.2-Kec.Sksr/2019 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Sukasari Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Sukasari Nomor : 050/Kep.008.2-Kec.Sksr/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Kecamatan Sukasari Kota Bandung juga melakukan REVISI terhadap Indikator Kinerja Utama. dalam melakukan REVISI dengan memperhatikan capaian kinerja. permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sukasari Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2019

No	IKU / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Renstra 2023	
						Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	80	80,60	100,75	80,50	100,12
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	%	80	98,79	123,48	81	121,96
Rata-Rata					112,11		111,04

Dari tabel tersebut bahwa tingkat pencapaian IKU sebagai berikut :

- Dari tabel IKU diatas sebanyak 2 (dua) indikator atau sebesar 100 % ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan masyarakat serta indicator tingkat pemberdayaan lembaga masyarakat dengan capaian 112,11%.

3.3. Pengukuran. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Sukasari Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018 - 2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran.



Tahun 2019 adalah tahun ke-satu pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan. dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Sukasari Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2019

No	IKU / Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi	Capaian	Akhir Renstra 2023	
							Target	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	100.23	80	80,60	101.75	80,50	100.12
2	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	-	100	100	100,00	100	100
3	Persentase Kelurahan Unggul	%	-	25	93,94	375,76	100	93,94
	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	%	104,04	80	98,79	123,48	81	98,76

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa tabel berikut :



Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Melebihi/ melampaui target	3 (tiga) Indikator sasaran/ 75.00%
2.	Sesuai target	1 (satu) Indikator sasaran/ 25.00%
3.	Tidak mencapai target	0 (nol) Indikator sasaran/ 00.00%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci sebagai berikut:

Dari 4 Indikator Sasaran diatas. pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pencapaian Target Sasaran
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)	
			JML	%	JML	%	JML	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sukasari	2	1	50	1	50	0	0
2.	Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100	0	0	0	0
3.	Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100	0	0	0	0



Dari 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja. pencapaian kinerja Kecamatan Sukasari Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2019

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran 1		
1.	Melebihi/ melampaui target	1	50.00%
2.	Sesuai target	1	50.00%
3.	Tidak mencapai target	0	0 %
B.	Sasaran 2		
1.	Melebihi/ melampaui target	1	100,00 %
2.	Sesuai target	0	0%
3.	Tidak mencapai target	0	0 %
C.	Sasaran 3		
1.	Melebihi/ melampaui target	1	100,00 %
2.	Sesuai target	0	50.00%
3.	Tidak mencapai target	0	0 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.



- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 4 indikator kinerja dari Misi RPJMD Kota Bandung. sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sukasari Kota Bandung tahun 2018 - 2023. analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sukasari

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sukasari

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018	Akhir Renstra Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	80	80,60	100,75	79.64	80,50	100,12



	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100	100,00	-	100	100,00
--	--	---	-----	-----	--------	---	-----	--------

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu

✚ Masyarakat Rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan

Penjelasan Umum Sasaran Indikator

Rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan merupakan alat pantau kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pengukuran mengacu pada permenpan nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Kinerja Nyata VS Rencana Kerja / tahun berjalan

Capaian kinerja nyata indikator Rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan adalah sebesar 80,60 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,75% atau melampaui target yang diperjanjikan.



Tabel 3.7

Rekapitulasi Nilai IKM Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Sukasari Setiap Triwulan Tahun 2019

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV
1.	Kecamatan	80,01	80,04	81,86	81,90
2.	Kelurahan Sarijadi	80,11	79,96	79,96	80,97
3.	Kelurahan Sukarasa	79,75	79,86	79,98	82,16
4.	Kelurahan Isola	79,77	79,84	80,05	83,50
5.	Kelurahan Gegerkalong	79,86	79,81	80,09	83,50
	Jumlah	399,50	399,51	401,94	411,05
	Rata-Rata Per Triwulan	79,90	79,90	80,39	82,21
	Rata Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sukasari Tahun 2018	$(79,90 + 79,90 + 80,39 + 82,21) / 4 =$ 80,60			

Nilai Unsur Pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh 5 unit kerja Kecamatan Sukasari masing masing terhadap 150 responden dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Indeks Unit Pelayanan = Nilai Unsur Pelayanan (NRR) x penimbang (0.111)

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks Unit Pelayanan x Nilai Dasar (25)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sukasari Tahun 2019 merupakan rata-rata dari pengukuran nilai IKM dari kecamatan dan kelurahan pada tiap triwulan, yakni $(79,90 + 79,90 + 80,39 + 82,21) / 4 =$ **80.60**. Dengan nilai tersebut mutu pelayanan pada Kecamatan Sukasari masuk dalam kategori **B**, dengan persepsi kinerja pelayanan **Baik**.



Kinerja Nyata dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan tahun berjalan rata rata nilai indeks kepuasan masyarakat kecamatan dan kelurahan sebesar 80,60 dari target 80 dengan capaian kinerja sebesar 100,75 %, bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu nilainya sebesar 79,64 dari target 79,45 dengan capaian sebesar 100,23%, maka dari realisasi dan dari segi capaian mengalami kenaikan dari 100,23 % menjadi 100,75 % atau mengalami kenaikan sebesar 0,52 %.

Kinerja Nyata dengan Akhir Renstra

Bila rata rata nilai indeks kepuasan masyarakat kecamatan dan kelurahan kelurahan sebesar 80,60 dari target 80 dengan capaian kinerja sebesar 100,75%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 80 maka capaian kinerja sebesar 100,12 %

Kinerja Nyata dengan Kinerja Instansi Lain

Bila rata rata nilai indeks kepuasan masyarakat kecamatan dan kelurahan kelurahan di Kecamatan Sukasari sebesar 80.60 dari target 80 dengan capaian kinerja sebesar 100,75%, bila dibandingkan dengan instansi/kecamatan lain yang memiliki tupoksi yang sama dengan kultur penduduk yang tidak jauh berbeda seperti kecamatan Sukajadi yang rata rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan dan kelurahan sebesar 78,77 dari target 76 dengan capaian nilai sebesar 102,21 maka kecamatan Sukasari mengalami kenaikan sebanyak 0,52 sedangkan Kecamatan Sukajadi menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 2,77.



Presentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu

Penjelasan Umum Sasaran Indikator

Dalam mendukung tercapainya Kota Bandung yang Wajar Tanpa Pengecualian maka perlu hasil temuan baik BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti sebelum/sesuai waktu yang telah ditentukan.

Kinerja Nyata vs Rencana Kerja / tahun berjalan

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindalanjuti adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.

Tabel 3.8

Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Tahun 2019

NO	Jenis temuan	Jumlah Temuan	Tindaklanjut temuan tepat waktu	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Keuangan	5	4	100
2	Barang	1	1	100
JUMLAH		5	5	100

Kinerja Nyata dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan tahun berjalan Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindalanjuti sebesar 100 % dari target 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %, maka kinerja nyata ini tidak



dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun sebelumnya tidak dilakukan pengukuran indikator Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindalanjuti.

Kinerja Nyata dengan Akhir Renstra

Bila Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindalanjuti sebesar 100 % dari target 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 100 % maka capaian kinerja sebesar 100 % sesuai target yang telah ditentukan.

Kinerja Nyata dengan Kinerja Instansi Lain

Bila Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindalanjuti di Kecamatan Sukasari sebesar 100 % dari target 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan instansi/kecamatan lain yang memiliki tupoksi yang sama dengan kultur penduduk yang tidak jauh berbeda seperti Kecamatan Sukajadi yang Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindalanjuti sebesar 100 % dari target 100 dengan capaian nilai sebesar 100 %. maka kecamatan Sukasari capaian kinerjanya sama mencapai 100 atau sesuai target.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator kinerja rata rata nilai indeks kepuasan masyarakat kecamatan dan kelurahan dan Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindalanjuti disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :



Faktor Pendukung :

1. Masyarakat lebih peka terhadap informasi baik yang diberikan di loket pelayanan maupun dimedia masa terkait dengan pelayanan di kecamatan gratis
2. Meningkatnya keahlian / ketrampilan dalam mengelola atau management keuangan dan barang dengan menurunnya jumlah temuan dari tahun sebelumnya

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya keping KTP dalam pelayanan kependudukan
2. Pengawasan terkait keuangan dan barang masih kurang temuan dari tahun sebelumnya

Solusi :

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk meminta penambahan keping KTP
2. Melakukan monev untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan barang dan keuangan

Sasaran 2

Meningkatnya Peran Kelembagaan, masyarakat dan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 2
Prosentase Kelurahan Unggul

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2017	Akhir Renstra Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Prosentase Kelurahan Unggul	%	25	93,94	375,76	-	100	100

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Prosentase Kelurahan Unggul.

Prosentase Kelurahan Unggul

Penjelasan Umum Sasaran Indikator

Kelurahan Unggul merupakan model untuk meningkatkan mutu dan kinerja kelurahan dengan memaksimalkan pembinaan dan keterlibatan dari unsur seksi yang ada ditingkat kecamatan sehingga perkembangannya diharapkan akan lebih cepat terwujud dan terarah dalam mendukung program Pemerintahan Kota Bandung yang pada akhir dapat dijadikan menjadi kelurahan percontohan.



Kinerja Nyata VS Rencana Kerja / tahun berjalan

Capaian kinerja nyata Prosentase Kelurahan Unggul adalah sebesar 93,94 % dari target sebesar 25 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya target sebesar 375,76 % dengan demikian capaian kinerjanya melebihi / melampaui target yang diperjanjikan.

Tabel 3.10

Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Kecamatan Sukasari
Tahun 2019

NO	KELURAHAN	NILAI UNSUR TINGKAT PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (%)				
		% RW UNGGUL	% PKK UNGGUL	% KARANG UNGGUL	% LPM UNGGUL	RATA - RATA
(1)	(2)	(3)			(5)	(6)
1	Sukarasa	98,50	91,15	90,32	85,00	91,24
2	Gegerkalong	97,80	84,00	100,00	98,00	94,95
3	Isola	100,00	90,91	93,75	91,67	94,08
4	Sarijadi	98,86	100,00	85,00	98,00	95,47
RATA RATA PER UNSUR		98,79	91,51	92,27	93,16	93,94
Kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan						

Sumber data : Kelurahan se- Kecamatan Sukasari

Dari tabel Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diatas dapat kita lihat data yang capaiannya yang tertinggi hingga capaiannya yang terendah hal ini bervariasi kinerjanya yang telah dilaksanakan 4 kelurahan di Kecamatan Sukasari.

Data tertinggi pada tabel diatas pada Kelurahan Isola dimana tingkat pemberdayaannya mencapai 100,00 % yang mengkomodir 100%



tercapainya janji Walikota / RPJMD dari jumlah sub kegiatan yang direncanakan dan realisasi.

Data terendah pada tabel dan grafik diatas pada 4 Kelurahan terutama kelurahan Gegerkalong yang tidak mencapai RW unggul mapupun PKK, Karang Taruna dan LPM Unggul. Lembaga kemasyarakatan kelurahan ini tetap mengakomodir kegiatan yang menunjang tercapainya Janji Walikota/RPJMD akan tetapi tidak mencapai persentase ketentuan formulasi yang terdapat dalam IKU Kecamatan Sukasari. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 Kota Bandung tidak ada proses perubahan anggaran.

Kinerja Nyata dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan tahun berjalan Prosentase Kelurahan Unggul sebesar 93,94% dari target 25 % dengan capaian kinerja sebesar 375,76%, maka kinerja nyata ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun sebelumnya tidak ada indikator Prosentase Kelurahan Unggul sehingga tidak dilakukan pengukuran indikator Prosentase Kelurahan Unggul.

Kinerja Nyata dengan Akhir Renstra

Bila realisasi indikator Prosentase Kelurahan Unggul dari 4 kelurahan yang ada sebesar 93,94% dari target 25% dengan capaian kinerja sebesar 375,76%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 100 % maka capaian kinerja sebesar 93,94 % dari target yang telah ditentukan atau sudah tercapai 4 kelurahan unggul pada tahun ini.

Kinerja Nyata dengan Kinerja Instansi Lain

Bila realisasi Prosentase Kelurahan Unggul dari 4 kelurahan sebesar 93,94% dari target 25 % dengan capaian kinerja sebesar 375,76%, bila



dibandingkan dengan instansi/kecamatan lain yang memiliki tupoksi yang sama dengan kultur penduduk yang tidak jauh berbeda seperti Kecamatan Sukajadi yang memiliki target sebesar 20 % realisasi sebesar 20 % dengan capaian 100%, maka kecamatan Sukasari memiliki capaian lebih tinggi sebesar 375,76 % sehingga selisih capaian sebesar 275 %.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator kinerja rata rata nilai indeks kepuasan masyarakat kecamatan dan kelurahan dan Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindalanjuti disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Respon seksi di tingkat kelurahan sangat baik dalam pemenuhan dokumen yang menjadi persyaratan kelurahan unggul;
2. Capaian kinerja nyata untuk akhir renstra telah tercapai.

Faktor Penghambat :

Masih Kurangnya pemahaman rancangan indikator kelurahan unggul

Solusi :

1. Melakukan sosialisasi rancangan pembentukan kelurahan unggul kepada pejabat struktural kecamatan dan kelurahan.
2. Melakukan perubahan jumlah minimal kriteria untuk mencapai prosentase kelurahan unggul.



Sasaran 3

Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019			Capaian Tahun 2018	Akhir Renstra Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	80	98,79	123,48	98,90	80	31,08

Sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Penjelasan Umum Sasaran Indikator

Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diperoleh dari pengukuran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 4 kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Sukasari.

Nilai tingkat lembaga kemasyarakatan = (% RW Unggul + % PKK Unggul + % Karang Taruna Unggul + % LPM Unggul) dibagi 4

% RW UNGGUL = Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW



- mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung
- % PKK Unggul = Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung
- % Karang Unggul = Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung
- % LPM Unggul = Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung

Kinerja Nyata VS Rencana Kerja / tahun berjalan

Capaian kinerja nyata Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adalah realisasi sebesar 98,79% dari target sebesar 80% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 123,48% atau melebihi target yang diperjanjikan.



Kinerja Nyata dengan Tahun Sebelumnya

Bila capaian kinerja nyata indikator tingkat pemberdayaan lembaga masyarakat yang memiliki realisasi sebesar 98,79% dari target sebesar 80% dengan tingkat capaian sebesar 123,48% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 atau tahun sebelumnya dengan capaian kinerja nyata Kecamatan Sukasari sebesar 104,04% maka capaian mengalami peningkatan sebesar 19,44%.

Kinerja Nyata dengan Akhir Renstra

Bila capaian kinerja nyata tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang realisasi sebesar 98,79% dari target sebesar 80% dengan capaian 123,48 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan dari target akhir renstra 81% maka capaian kinerjanya mencapai 121,96%. sehingga perlu adanya peningkatan perencanaan untuk target Tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada tahun 2020.

Kinerja Nyata dengan Kinerja Instansi Lain

Bila capaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tahun 2019 dibandingkan dengan OPD lain (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama maka :



Tabel 3.12

Data Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
Tahun 2019

NO	NAMA SKPD / UNIT KERJA	UNSUR PENILAIAN JUARA			
		Target	Realisasi	Capaian %	Rang King
1	ANDIR	33.33	65.83	197.51	7
2	ANTAPANI	80.00	88.49	110.61	17
3	ARCAMANIK	80.00	94,82	118.53	13
4	ASTANA ANYAR	54.00	54.00	100.00	22
5	BABAKAN CIPARAY	78.50	92.31	117.59	14
6	BANDUNG KIDUL	45.00	48.93	108.73	18
7	BANDUNG KULON	83.00	83,17	100.20	21
8	BANDUNG WETAN	11.61	9.91	85.36	28
9	BATUNUNGGAL	25.78	69.80	270.75	3
10	BOJONGLOA KALER	50.00	64.79	129.58	11
11	BOJONGLOA KIDUL	21.45	21.45	100.00	22
12	BUAHBATU	25.00	44.80	179.20	8
13	CIBEUNYING KALER	23.10	14.82	64.16	30
14	CIBEUNYING KIDUL	15.71	77.64	494.21	1
15	CIBIRU	60.00	62.12	103.53	20
16	CICENDO	81.50	91.07	111.74	16
17	CIDADAP	25.28	50.63	200.28	6
18	CINAMBO	82.00	82.00	100.00	22
19	COBLONG	78,99	89,40	113.18	15
20	GEDEBAGE	25.00	64.88	259.52	4
21	KIARACONDONG	38,65	38,65	100.00	22
22	LENGKONG	25.00	70.11	280.44	2
23	MANDALAJATI	17.92	26.90	150.11	9
24	PANYILEUKAN	24.87	24.87	100.00	22



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

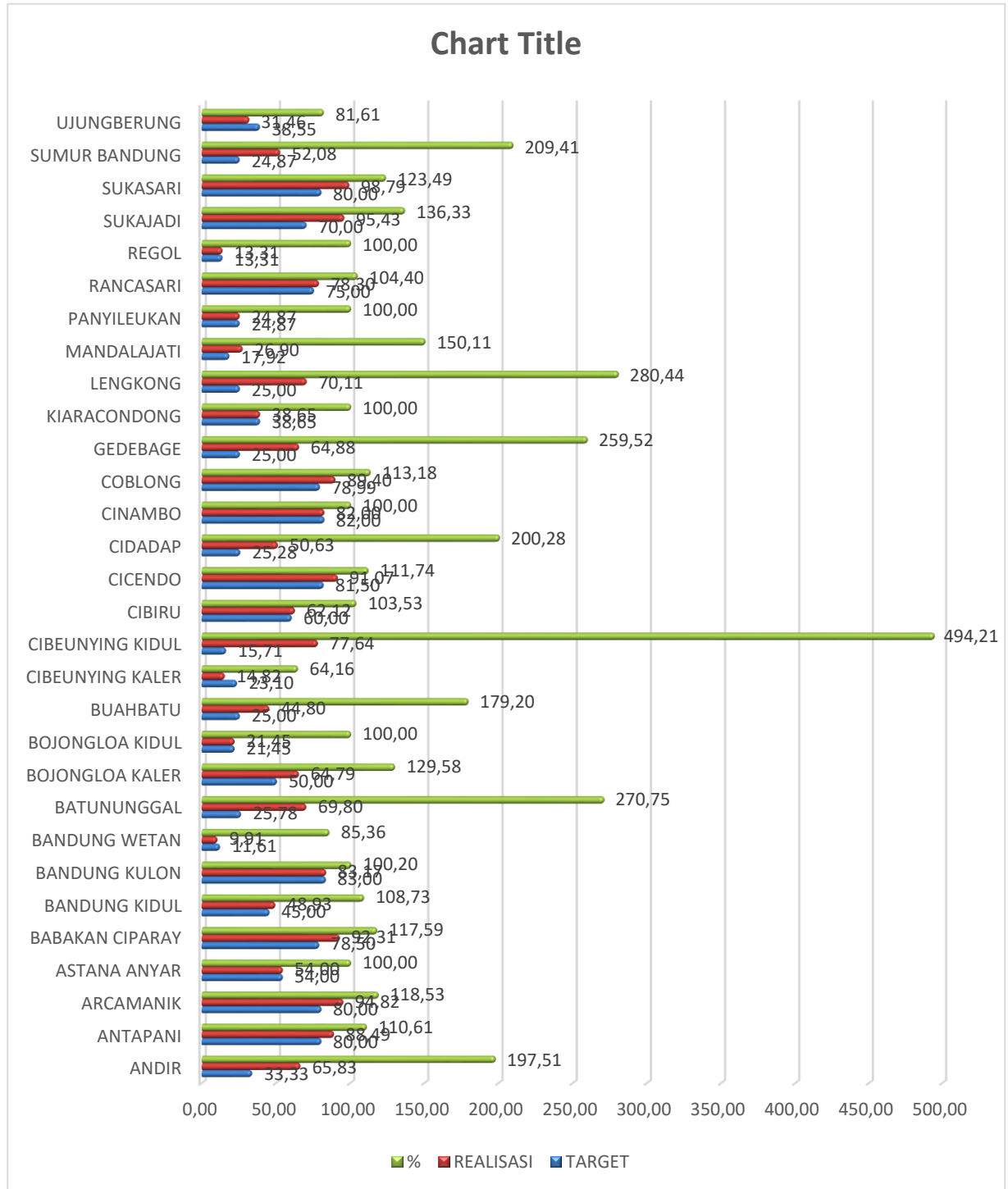
25	RANCASARI	75.00	78.30	104.40	19
26	REGOL	13.31	13.31	100.00	22
27	SUKAJADI	70.00	95,43	136.33	10
28	SUKASARI	80.00	98.79	123.49	12
29	SUMUR BANDUNG	24.87	52.08	209.41	5
30	UJUNGBERUNG	38.55	31.46	81.61	29

Grafik 3.3.1



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2019





Bila melihat tabel dan grafik untuk capaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dibandingkan dengan kecamatan lain bervariasi sehingga dari tabel dapat dilihat menduduki ranking 1 sampai dengan ranking 30. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya :

- Banyaknya RW dan kelurahan dari masing masing kecamatan
- Tingkat Perencanaan kegiatan yang belum maksimal hal ini dapat dilihat dari persentase tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dari 30 kecamatan terdapat 21 kecamatan yang capaiannya melebihi 100 %

Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator kinerja Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Perencanaan sudah sebagian terpilah dalam sub kegiatan

Faktor Penghambat :

1. Tidak jadinya perubahan Anggaran
2. Lebih memantapkan perencanaan sehingga meminimalisir kesalahan

Untuk meningkatkan capaian indikator tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas. maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :

1. Melakukan pemahaman bersama terkait kriteria dan pemahaman istilah yang terkait dengan perencanaan
2. Dapat lebih mengarahkan kembali kepada pejabat struktural baik di kecamatan maupun di kelurahan dalam membuat perencanaan



anggaran yang dapat mendukung pencapaian IKI dan mendukung tercapainya RPJMD.

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program-program yang diimplementasikan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukasari. Berikut ini adalah rincian program dan kegiatan yang mendukung sasaran beserta output yang dihasilkan :

Capaian Kinerja Sasaran 1 yakni Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Sukasari di dukung oleh Program antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
- Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum



Tabel 3.13

Program, Kegiatan, Anggaran, Output dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1 Tahun 2019

N O	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	OUT PUT	REALI SASI ANGGARA N (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 348,434,578	262,350,958	12 laporan bulanan	75,29
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 15,547,500	9,671,000	12 laporan bulanan	62,20
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 3,600,000	3,500,000	12 laporan bulanan	97,22
		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 22,105,000	16,682,500	12 laporan bulanan	75,47
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 71,131,818	70,527,805	12 laporan bulanan	99,15
		Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Rp 24,789,750	24,503,800	12 laporan bulanan	98,85
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6,445,600	6,321,700	12 laporan bulanan	98,08
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 228,498,683	220,814,000	12 laporan bulanan	96,64
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 16,270,000	15,555,000	12 laporan bulanan	95,61
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 95,477,200	93,291,550	12 laporan bulanan	97,71
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 8,989,000	8,239,770	12 laporan bulanan	91,67
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 45,554,649	45,455,362	12 laporan bulanan	99,78



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Tekniks Perkantoran	Rp 633,000,000	622.625.000	12 laporan bulanan	98,36
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Meubelair	Rp 4,931,080	4,708,000	12 laporan bulanan	95,48
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp 132,595,000	130.901.565	12 laporan bulanan	98,72
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp 439,524,680	400.643.893	12 laporan bulanan	91,15
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembinaan Kinerja Aparatur	Rp 70,653,559	70,097,500	12 laporan bulanan	99,21
4	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan	Rp 87,017,750	84,547,650	5 Jenis	97,62
		Pembinaan RT/RW	Rp 1,042,638,828	1.039.776.950	32 RT/RW	98,24
5	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Rp 1,527,335,000	1,511,835,750	12 laporan bulanan	98,99
		Pemeliharaan RTH Kecamatan	Rp 284,762,321	266,185,100	55 m2	93,48
		Kegiatan Pengecatan Kerb Bahu Jalan	Rp 22,295,206	21,703,400	32 RT/RW	97,35
JUMLAH			Rp 5.131.597,102,46	4.929.938.253	REALISASI (%)	96,07

Capaian Kinerja Sasaran 2 yakni Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di dukung oleh Program antara lain:

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ;
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- Pogram Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
- Pogram Pemberdayaan KUMKM ;



- Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Berikut ini adalah rincian program dan kegiatan yang mendukung sasaran beserta output yang dihasilkan :

Tabel 3.14

Program, Kegiatan, Anggaran, Output, dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 2 Tahun 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	OUT PUT	SISA ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (%)
1	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Rp 950,393,600	Rp 925.733.450	32 RW	24.660.150	97,41
2	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenvang RKPD Kewilayahan	Rp 23,836,250	Rp 23,725,500	1 Dok	112,000	99,53
3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Rp 469,899,050	Rp 452.687.400	294 orang	17.211.650	92,80
4	Pemberdayaan KUMKM	Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	Rp 42,009,580	Rp 40.552.650	45 KUM KM	1.456.930	96,53
5	Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Rp 254,309,930	Rp 239.310.770	34 orang	14.999.160	93,44
J U M L A H			Rp 1,740,448,410	Rp 1.682.009.770	REALISASI ANGGARAN (%)	58.438.640	96,64

Capaian Kinerja Sasaran 3 yakni Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di dukung oleh Program yaitu Program Pemberdayaan Kewilayahan.



Berikut ini adalah rincian program dan kegiatan yang mendukung sasaran beserta output yang dihasilkan :

Tabel 3.15

Program, Kegiatan, Anggaran, Output, dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 3 Tahun 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	OUT PUT	SISA ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (%)
1	Pemberdayaan Kewilayahan	Pemberdayaan Lingkup RW	Rp 3,200,000,000	Rp 3.048.058.626	32 RW	239868,374	92,50
		Pemberdayaan Lingkup PKK	Rp 400,000,000	Rp 394.349.860	1 Dok	112,000	99,53
		Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Rp 400,000,000	Rp 391.240.750	294 orang	79,574,850	79,46
		Pemberdayaan Lingkup LPM	Rp 400,000,000	Rp 390.878.750	45 KUM KM	3,032,230	92,78
J U M L A H			Rp 4,400,000,000	Rp 4.224.527.986	REALISASI ANGGARAN (%)	175.472.014	96,01

1.4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sukasari Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2019 dengan total nilai keseluruhan untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sukasari adalah sebesar **Rp. 11.272.045.512,46** dan terealisasi sebesar **Rp. 10.836.474.759,00** atau dengan serapan dana APBD untuk sasaran Meningkatnya kualitas



pelayanan publik di Kecamatan Sukasari mencapai **96,14 %**. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Sukasari Kota Bandung pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16

**Rencana dan Realisasi Anggaran
Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Tahun 2019**

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sukasari	5.131.597.102,46	4.929.938.253,00	96.07
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.740.448.410,00	1.682.008.520,00	96.64
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	4.400.000.000,00	4.224.527.986,00	96.01
JUMLAH		11.272.045.512,46	10.836.474.759,00	96,14



**Rencana dan Realisasi Kinerja
Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Tahun 2019**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sukasari	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukasari	80	80,60	100,75
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	100	100,00
	Rata Rata				100,37
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	25	93,94	375,76
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80	98,79	123,48
Rata Rata Capaian Sasaran					199,87

Untuk mengetahui sejauh mana efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang digunakan per sasaran pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.17
Tingkat Efisiensi Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Sukasari Kota BAndung
Tahun 2019

No	Sasaran	% Kinerja	% Capaian Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3-4
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sukasari	100.75	96.07	4.53
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	375.76	96.64	279.12
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	123.48	96.14	27.34
Rata – Rata Efisiensi		199.87	96.28	103.66

Secara umum efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Sukasari Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efisien terhadap capaian sasaran kinerja.

Dengan rata-rata persentase efisiensi anggaran terhadap pagu indikatif Renstra sebesar 103.66% maka secara umum efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Sukasari Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan **efisien** terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Tabel 3.18
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Tahun 2019

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1,	2	100,60	4.929.938.253	96.07
1	Melebihi/Melampaui Target	1	101,20		
2	Sesuai Target	1	100.00		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
Tingkat Efektifitas Kinerja					104,71%
B.	Sasaran 2,	1	375,76	1.682.008.520	96.64%
1	Melebihi/Melampaui Target	1	375,76		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
Tingkat Efektifitas Kinerja					388,82%
C.	Sasaran 3,	1	123,48	4.224.527.986	96.01 %
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
Tingkat Efektifitas Kinerja					128,61%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Sukasari Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian sasaran kinerja.



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

Dengan rata-rata persentase realisasi anggaran terhadap pagu indikatif Renstra maka secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Sukasari Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan **efektif** terhadap capaian kinerja misi organisasi.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Sukasari Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Sukasari Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,60%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 375,76%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 123,48%



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 11.272.045.512,46 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.836.474.759,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Kecamatan Sukasari Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 435.570.753,46

Renstra Kecamatan Sukasari Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,60%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 375,76%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 123,48%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. Rp. 11.272.045.512,46 telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Sukasari Kota Bandung adalah 96,14% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Sukasari Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih



L K I P Kecamatan Sukasari Tahun 2019

efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukasari Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Sukasari Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 5 Januari 2019



Drs. H.R. SARJANI SALEH, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19660225 198812 1 001